

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biografi Singkat Voltaire dan Konteks Historis

Voltaire (1694–1778) adalah filsuf, penulis, dan kritikus sosial Prancis yang dikenal sebagai tokoh utama Pencerahan. Ia lahir di Paris dari keluarga borjuis, belajar hukum, dan awalnya dikenal sebagai penyair satir yang tajam dalam mengkritik kondisi sosial, politik pada masanya. Pemikiran Voltaire tidak terlepas dari latar belakang sejarah yang dia hadapi. Eropa pada waktu itu tengah mengalami konflik agama yang berkepanjangan, terutama antara Katolik dan Protestan. Konflik Agama di Prancis (1562–1598) dan pembantaian Santo Bartholomeus (1572) adalah contoh yang jelas bagaimana fanatisme agama bisa memicu kekerasan. Pengalaman sejarah ini membentuk sensitivitas Voltaire terhadap pentingnya toleransi dalam masyarakat.²⁰

Pada abad ke-18, Voltaire hidup di era absolutisme monarki Prancis di bawah Louis XIV dan XV, di mana Gereja Katolik memiliki kekuasaan besar, sering menindas kelompok minoritas. Pencerahan, gerakan intelektual yang mendorong akal sehat dan ilmu pengetahuan, memberikan Voltaire platform untuk mengkritik tirani agama dan mendorong toleransi sebagai

²⁰Voltaire, *Traktat Toleransi*, ed. Pusvyta Sari (Yogyakarta: LKiS, 2021), 179–185.

alternatif untuk perdamaian sosial.²¹ Karena kritiknya yang tajam, Voltaire mengalami penangkapan dan pengasingan beberapa kali. Ia pernah ditahan di Bastille dan diasingkan ke Inggris, di mana dia terinspirasi oleh sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan toleran. Pengalaman ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa kebebasan berpikir dan toleransi adalah landasan penting bagi masyarakat yang lebih baik. Akhir hidupnya, Voltaire menetap di Ferney, dekat perbatasan Swiss, dan terus menulis karya yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk toleransi, keadilan, dan kebebasan beragama. Dengan cara ini, pemikiran Voltaire lahir dari kombinasi refleksi filosofis dan pengalaman sejarah yang nyata.

B. Toleransi dalam Perspektif Voltaire

1. Batas Kebebasan

Dalam karyanya yang berjudul *Tratado sobre la Tolerancia* atau Traktat tentang Toleransi yang diterbitkan tahun 1763, Voltaire mendefinisikan toleransi sebagai kebebasan untuk menyembah Tuhan menurut hati nurani masing-masing.²² Penting untuk dipahami bahwa Voltaire membedakan secara tajam antara toleransi dengan indifferentisme, di mana toleransi adalah sikap menghormati hak seseorang untuk berbeda pendapat sedangkan indifferentisme adalah

²¹Adrian Ratto, "Los Límites De La Idea De 'Tolerancia' En Los Escritos De Voltaire (1760–1770)," *Praxis Filosófica* 46 (2018): 243–260.

²²Voltaire, *Traktat Toleransi*, 149–153.

sikap acuh tak acuh terhadap kebenaran itu sendiri. Meskipun demikian, Voltaire bukanlah seorang relativis yang semua agama memiliki kebenaran yang sama, karena ia tetap percaya bahwa beberapa agama mungkin lebih rasional dibandingkan yang lain, namun tidak ada kelompok manapun yang berhak memaksakan keyakinannya kepada orang lain karena setiap individu memiliki hak fundamental untuk memilih keyakinannya sendiri.²³

Dari perspektif epistemologis, Voltaire menantang kepastian absolut dalam hal keyakinan religius. Voltaire berargumen bahwa pemahaman manusia selalu terbatas dan tidak ada individu atau kelompok yang memiliki otoritas mutlak atas kebenaran, sehingga ketidakpastian epistemologis ini seharusnya mendorong setiap orang untuk sikap yang lebih toleran terhadap perbedaan. Secara moral, Voltaire menekankan bahwa semua manusia adalah bagian dari satu spesies dengan hak yang sama, bahwa Tuhan tidak melihat kecuali hati nurani setiap individu, dan bahwa prinsip harus diterapkan agar setiap orang bebas selama tidak merugikan orang lain. Secara pragmatis, Voltaire menunjukkan bahwa intoleransi justru berbahaya bagi masyarakat karena menindas minoritas hanya akan menciptakan konflik sosial yang lebih besar, fanatisme religius menyebabkan kekerasan dan

²³Voltaire, *Traktat Toleransi*, 119.

perang yang berkepanjangan, dan sebaliknya toleransi membawa kedamaian sosial serta kemajuan bagi seluruh masyarakat.²⁴

Voltaire mengartikulasikan toleransi dalam beberapa bentuk yang saling terkait satu sama lain. Dalam ranah toleransi agama, Voltaire mengecam keras penyiksaan terhadap kaum Huguenot atau Protestan Prancis, diskriminasi terhadap umat Yahudi, dan intoleransi terhadap kaum deis dan ate, sehingga ia menyerukan penghapusan hak istimewa tunggal Gereja Katolik, kesetaraan hak bagi semua denominasi Kristen, dan perlindungan bagi pemeluk agama non-Kristen.²⁵ Dalam toleransi intelektual, Voltaire adalah pembela yang gigih bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers dari sensor negara, serta penelitian ilmiah yang bebas dari dogma religius.²⁶ Sementara dalam toleransi politik, Voltaire mendukung adanya monarki konstitusional yang membatasi kekuasaan absolut, pembatasan kekuasaan gereja dalam urusan negara, dan pemerintahan yang netral dalam urusan agama.²⁷

²⁴J.B. Shank, "Voltaire," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Stanford University, 2024), (di akses 02 Maret 2026)

²⁵Jonathan Menezes, "Da Tolerância à Caridade: Sobre Religião, Laicidade e Pluralismo Na Atualidade," *Estudos Historicos* 28, no. 55 (2015): 189–209.

²⁶Menezes, "Da Tolerância à Caridade: Sobre Religião, Laicidade e Pluralismo Na Atualidade," 193.

²⁷Ole Peter Grell and Roy Porter, "Toleration in Enlightenmen Europe," in *The Politics of Toleration in the Enlightenment* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 3.

2. Penolakan terhadap Fanatisme

Perspektif Voltaire tentang toleransi merupakan salah satu kontribusi utama dalam filsafat Pencerahan (*Enlightenment*) abad ke-18, yang menekankan rasionalitas dan kebebasan individu sebagai dasar terciptanya harmoni sosial. Voltaire, nama pena dari François-Marie Arouet,²⁸ hidup pada masa di mana Eropa dilanda konflik agama yang brutal, sehingga pandangannya tentang toleransi lahir dari pengalaman historis dan kritik terhadap fanatisme.²⁹

Karya utama Voltaire tentang toleransi adalah *Tratado sobre la Tolerancia* (1763), yang ditulis sebagai respons terhadap kasus Jean Calas, seorang Protestan yang dieksekusi secara tidak adil oleh pengadilan Katolik di Toulouse atas tuduhan membunuh anaknya.³⁰ Dalam esai ini, Voltaire mengadvokasi toleransi sebagai solusi untuk mencegah kekejaman seperti itu. Ia juga mengintegrasikan tema toleransi dalam novel satir *Candide* (1759), di mana tokoh utama mengalami berbagai penderitaan akibat fanatisme agama dan perang,

²⁸Voltaire, *Traktat Toleransi*, 179.

²⁹Eduardo Bello, "El Concepto de Tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire," *Res Publica: Revista de Historia de las Ideas Políticas* 6 (2006): 37–39.

³⁰Marc-Antoine adalah anak dari Calas, ia bunuh diri namun ayahnya dituduh sebagai pembunuh anaknya. Marc-Antoine ditemukan oleh Pierre Calas setelah mereka makan malam, dalam kondisi tergantung disebuah pintu. Calas dihukum dengan tuduhan membunuh anaknya yang akan menjadi katolik (sebelumnya protestan). Calas dihukum mati di Toulause setelah putusan pengadilan pada 9 Maret 1762. Calas mendapat hukuman mati untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebobrokan dari relasi kuasa agama yang "mendominasi" yakni Katolik pada saat itu.

akhirnya menyimpulkan bahwa dunia ini tidak sempurna, sehingga manusia harus saling toleran untuk mencapai kebahagiaan.

Esai-esai Voltaire seperti *Kuil Gout* (1733) menunjukkan bahwa toleransi mendorong kemajuan ekonomi dan intelektual. Karyanya sering menggunakan ironi dan satire untuk mengecam intoleransi, seperti dalam *Dictionnaire philosophique portatif* (1764), di mana ia mendefinisikan toleransi sebagai "kebajikan orang-orang yang tidak percaya apa-apa"—artinya, toleransi lahir dari keraguan rasional, bukan dari keyakinan dogmatis.³¹ Inti pandangan Voltaire adalah bahwa toleransi adalah prinsip rasional yang diperlukan untuk harmoni sosial, bukan kompromi moral. Ia menolak fanatisme agama, yang ia anggap sebagai sumber utama kekerasan, dan berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi yang tidak boleh dipaksakan oleh negara atau kelompok mayoritas.³²

3. Netralitas Institusi

Dalam pandangannya, Voltaire menekankan perlu adanya batasan pada kekuasaan lembaga keagamaan dalam ranah publik. Ia tidak ingin adanya supremasi dari satu agama tertentu, tetapi lebih mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang memberikan kebebasan beribadah dan perlindungan yang adil untuk semua kelompok. Dengan

³¹Voltaire, *Traktat Toleransi*, 181–183.

³²Bello, "El Concepto de Tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire," 38.

demikian, diharapkan negara dapat bersikap netral dalam masalah agama untuk memelihara keadilan serta ketertiban sosial.³³

Dalam Traktat Toleransi, Voltaire menyatakan bahwa:

*“Untuk lebih jauh aku akan mengatakan pada anda bahwa kita harus memperhatikan seluruh orang seperti saudara kita sendiri. Apa! Saudaraku orang Turki? Saudaraku orang China? Orang Yahudi? Orang Siam? Ya tanpa terkecuali bukankah kita semua anak dari satu bapak dan diciptakan oleh Tuhan yang sama?”*³⁴

Toleransi adalah satu-satunya jalan untuk menghindari perang dan ia menyerukan hukum yang melindungi minoritas agama. Pandangannya aktif, bukan pasif: toleransi bukan sekadar menghindari konflik, melainkan mendorong kerjasama untuk membangun masyarakat serta menciptakan kehidupan yang lebih seimbang di antara perbedaan.³⁵

Voltaire juga mengkritik agama sebagai institusi yang sering korup, namun ia tidak menolak keberadaan Tuhan sepenuhnya; ia lebih menekankan deisme, di mana Tuhan adalah arsitek alam semesta, bukan penguasa yang intervensi. Toleransi, baginya, adalah alat untuk mencapai "kebahagiaan umum" (*bonheur public*), di mana masyarakat maju melalui perdamaian dan inovasi. Ia menyerukan hukum yang melindungi minoritas, seperti amnesti untuk korban intoleransi, dan

³³Voltaire, *Traktat Toleransi*, xxv.

³⁴Voltaire, *Traktat Toleransi*, 149.

³⁵Bello, “El Concepto de Tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire,” 38.

pendidikan untuk membasmi prasangka.³⁶ Toleransi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan koeksistensi damai di tengah keragaman. Misalnya, ia membela Yahudi, protestan, katolik, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa toleransi universal melampaui batas agama Kristen.

Voltaire menyaksikan langsung dampak destruktif dari intoleransi terhadap kehidupan masyarakat Prancis abad ke-18, di mana perang agama antara Katolik dan Protestan masih meninggalkan trauma yang mendalam, institusi Inkuisisi aktif menindas pemikiran yang berbeda, dan fanatisme religius dianggap sebagai ancaman serius bagi kedamaian sosial.³⁷ Pengalaman langsungnya terhadap ketidakadilan ini, terutama setelah ia mempelajari secara mendalam kasus Jean Calas pada tahun 1762, seorang Protestan yang dieksekusi tanpa bukti yang jelas atas tuduhan membunuh putranya yang ingin memeluk Katolik, menjadi titik balik yang semakin memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip toleransi.

Kritik utama Voltaire terhadap intoleransi terfokus pada institusi-institusi yang ia anggap paling bertanggung jawab atas kekerasan dan penindasan. Secara khusus, Voltaire mengkritik Gereja Katolik karena Inkuisisi yang melakukan penyiksaan dan penghakiman

³⁶Voltaire, *Traktat Toleransi*, 25–33.

³⁷Voltaire, *Traktat Toleransi*, 57.

yang tidak manusiawi, kasta imam yang mengeksploitasi umat atas nama Tuhan, dan perang-perang agama yang dilakukan atas nama iman.³⁸ Namun, penting untuk dicatat bahwa Voltaire bukanlah anti-agama, karena ia percaya pada Tuhan pencipta sesuai dengan pandangan deisnya dan menganggap agama memiliki fungsi moral yang penting bagi masyarakat.³⁹ Lebih dari itu, Voltaire mengecam fanatisme dalam segala bentuknya, baik fanatisme religius, politik, maupun ideologis, karena ia menilai bahwa fanatisme adalah penyakit kepercayaan yang membunuh kesucian dan kemanusiaan.⁴⁰

Karya-karya utama Voltaire yang membahas tema toleransi sangat berpengaruh pada masanya dan terus relevan hingga sekarang. *Tratado sobre la Tolerancia* merupakan ekspresi paling lengkap dari pemikiran Voltaire, yang di dalamnya terdapat kisah nyata korban intoleransi (seperti Jean Calas), argumen filosofis tentang hak toleransi, seruan untuk reformasi hukum, dan kritik terhadap kekerasan atas nama agama.⁴¹ *Dictionnaire Philosophique Portatif* atau Kamus Filsafat Praktis yang diterbitkan tahun 1764 berisi banyak entri yang membahas tema toleransi, termasuk pasal tentang ateisme dan deisme, kritik terhadap dogma religius, serta pembelaan kebebasan berpikir. Selain

³⁸Wendy McElroy, "The Origin of Religious Tolerance: Voltaire," *Independent Institute*, January 5, 2008, (di akses 02 Maret 2026)

³⁹McElroy, "The Origin of Religious Tolerance: Voltaire."

⁴⁰Menezes, "Da Tolerância à Caridade: Sobre Religião, Laicidade e Pluralismo Na Atualidade," 195.

⁴¹Bello, "El Concepto de Tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire," 38.

itu, Voltaire juga menyebarkan ide-idenya melalui surat-surat yang dikirimkan kepada para pemimpin Eropa, yang secara efektif mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah pada masa itu.

Pengaruh langsung pemikiran Voltaire dapat dirasakan dalam berbagai dokumen dan pergerakan penting sejarah modern. Pemikirannya mempengaruhi isi *Deklarasi Hak Asasi Manusia* tahun 1789, yang menjamin kebebasan berekspresi dan agama, serta pergerakan reformasi religius di seluruh Eropa.⁴² Secara lebih luas, Voltaire meletakkan dasar bagi sekularisme negara modern, pluralisme religius, dan hak asasi manusia universal yang kini diakui di seluruh dunia. Meskipun demikian, para sarjana juga mencatat beberapa keterbatasan dalam pemikiran Voltaire, di mana toleransi yang ia anut cenderung bersifat elitis karena terutama ditujukan untuk kaum terdidik, pandangan Voltaire tentang kolonialisme seringkali kontradiktif dengan prinsip toleransinya.⁴³

Di era kontemporer, prinsip toleransi Voltaire tetap sangat relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks modern seperti dialog antarumat beragama, kebebasan berekspresi di era digital, pluralisme dalam masyarakat majemuk, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Namun, dunia modern juga

⁴²Voltaire, *Traktat Toleransi*, xxiv.

⁴³Menezes, "Da Tolerância à Caridade: Sobre Religião, Laicidade e Pluralismo Na Atualidade," 195.

menghadapi tantangan baru seperti ekstremisme ideologis, polarisasi politik yang semakin parah, dan intoleransi berbasis identitas yang memerlukan solusi kreatif.

Pemikiran Voltaire menawarkan kerangka yang berguna untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui rasionalitas dan dialog, pengakuan atas martabat universal setiap manusia, serta penolakan terhadap kekerasan atas nama keyakinan apa pun. Pada intinya, toleransi menurut Voltaire bukan sekadar sikap pasif melainkan prinsip aktif yang menuntut keberanian untuk mempertahankan hak setiap orang untuk berbeda, sebuah prinsip yang tetap relevan dan penting untuk diperjuangkan di era modern ini.

Dengan demikian, pemahaman tentang konsep toleransi menurut Voltaire dalam penelitian ini dijelaskan melalui tiga poin utama.

1. Pertama, toleransi berkaitan dengan batasan kebebasan, di mana setiap orang bebas beragama asal tidak menyakiti orang lain.⁴⁴
2. Kedua, toleransi adalah penolakan terhadap semua bentuk fanatisme yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat.⁴⁵

⁴⁴Voltaire, *Traktat Toleransi*, 58-59.

⁴⁵Maulana Iban Salda, Syamsul Rijal, dan Taslim HM. Yasin, "Perseteruan Voltaire Terhadap Islam Dan Nabi Muhammad," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 1-194.

3. Ketiga, toleransi memerlukan netralitas dari institusi, terutama negara dan lembaga sosial, agar tidak berpihak pada satu agama saja dan dapat memastikan keadilan bagi semua kelompok. Ketiga poin ini menjadi landasan analisis untuk memahami praktik toleransi dalam masyarakat yang memiliki berbagai agama.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan ketiga poin tersebut untuk mengamati cara batasan kebebasan diterapkan, bagaimana upaya menghindari fanatisme, serta peranan lembaga dalam mempertahankan netralitas di antara masyarakat yang beragam agama di Se'pon Makale.

C. Toleransi Sebagai Akal Budi Perspektif Voltaire

Dalam pandangan Voltaire, toleransi bukan sekadar sikap sosial, melainkan juga sebagai keharusan dari akal budi manusia. Sebagai bagian dari gerakan Pencerahan, Voltaire menekankan pentingnya rasionalitas sebagai fondasi utama untuk memahami kenyataan hidup, termasuk dalam menghadapi perbedaan keyakinan.⁴⁶ Voltaire percaya bahwa manusia adalah makhluk yang mampu berpikir dan mempertimbangkan berbagai kebenaran.⁴⁷ Namun, ia juga memahami bahwa kemampuan berpikir manusia tidaklah sempurna. Tak satupun orang atau kelompok yang bisa mengklaim memiliki kebenaran yang sepenuhnya absolut.

⁴⁶ Bello, "El Concepto de Tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire," 38.

⁴⁷ Bello, "El Concepto de Tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire," 41.

Dari sudut pandang epistemologis, keterbatasan yang dimiliki manusia menjadi dasar bagi timbulnya sikap toleransi. Ketika individu menyadari bahwa pemahaman mereka tidak sempurna, mereka akan lebih siap menerima perbedaan dan tidak berusaha memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Dengan demikian, toleransi muncul dari kesadaran kritis tentang keterbatasan diri sendiri.⁴⁸ Voltaire menentang pandangan dogmatis yang beranggapan bahwa satu sudut pandang adalah kebenaran tunggal yang absolut.⁴⁹ Pandangan semacam itu justru menjadi sumber intoleransi dan ketegangan. Oleh karena itu, ia mendukung penggunaan akal secara kritis agar manusia dapat menghargai perbedaan sebagai bagian dalam kehidupan masyarakat.

Lebih jauh lagi, Voltaire melihat bahwa pemanfaatan akal tidak hanya bertujuan untuk mengenali dunia, tetapi juga untuk mengatur interaksi antar individu.⁵⁰ Akal membantu manusia menyadari bahwa hidup di tengah beragamnya identitas adalah suatu kenyataan yang harus diterima.⁵¹ Oleh karena itu, dibutuhkan sikap yang menerima dan kemampuan untuk menghargai perbedaan sebagai hal yang umum.⁵² Dalam konteks ini, toleransi muncul sebagai suatu hasil dari pemikiran rasional yang mendalam tentang kondisi sosial.

⁴⁸Bello, "El Concepto de Tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire," 50.

⁴⁹Bello, "El Concepto de Tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire," 50.

⁵⁰Ida Sundari Husen, *Voltaire: Dongeng Filsafat Prancis* (Magelang: IKAPI, 2003), 3.

⁵¹Husen, *Voltaire: Dongeng Filsafat Prancis*, 3.

⁵²Husen, *Voltaire: Dongeng Filsafat Prancis*, 3–4.

Dalam perspektif moral, Voltaire menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat setara, sehingga tidak ada alasan untuk merendahkan atau menindas orang lain karena perbedaan dalam keyakinan.⁵³ Dalam hal ini, toleransi menjadi bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Selain itu, toleransi sebagai bentuk tuntutan akal juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk hidup harmonis di dalam masyarakat yang beragam.⁵⁴ Akal mengajarkan bahwa konflik dan kekerasan bukanlah solusi, melainkan justru memperburuk keadaan sosial.⁵⁵ Maka dari itu, toleransi menjadi pilihan rasional dalam menciptakan keharmonisan.

Selain itu, toleransi sebagai hasil dari akal sehat juga terhubung dengan prinsip-prinsip keadilan.⁵⁶ Akal sehat mengarahkan manusia untuk memperlakukan sesama secara adil, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan.⁵⁷ Dengan demikian, toleransi tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan dalam membangun masyarakat yang adil dan setara.

Voltaire juga menggarisbawahi bahwa toleransi tidak berarti seseorang harus mengesampingkan keyakinannya. Sebaliknya, seseorang

⁵³Patrick Henry, "Voltaire as Moralist," *Journal of the History of Ideas* 38, no. 1 (1977): 141–146.

⁵⁴Fidelis Aggiornamento Saintio and E. Agra Sarika Kurnia D., "Mengkomunikasikan Keadilan Dan Kemanusiaan: Mengkritik Intoleransi Dan Mengupayakan Keadilan Ala Voltaire," in *Mengkomunikasikan Keadilan Dan Kemanusiaan Bunga Rampai Tulisan Fakultas Hukum Dan Komunikasi* (Semarang: IKAPI, 2025), 48.

⁵⁵Henry, "Voltaire as Moralist," 143–144.

⁵⁶Dinar Dewi Kania, "Konsep Nilai Dalam Peradaban Barat," *Tsaqafah* 9, no. 2 (November 2013): 245–262.

⁵⁷Saintio and D., "Mengkomunikasikan Keadilan Dan Kemanusiaan: Mengkritik Intoleransi Dan Mengupayakan Keadilan Ala Voltaire," 47–48.

dapat mempertahankan keyakinannya sambil tetap menghargai hak orang lain untuk percaya pada hal yang berbeda.⁵⁸ Dengan begitu, toleransi menurut Voltaire adalah hasil dari penggunaan akal yang bijak, yang mampu menerima keterbatasan manusia, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama.⁵⁹

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan Voltaire tentang toleransi adalah sebuah sikap yang berasal dari kemampuan berpikir manusia. Toleransi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui pemikiran yang analitis dan reflektif mengenai kenyataan hidup. Dengan kata lain, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemanfaatan nalar seseorang, maka semakin besar kesempatan bagi individu tersebut untuk menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang terdapat dalam masyarakat.

D. Toleransi Voltaire Dalam Perspektif Ekonomi

Selain aspek sosial dan moral, Voltaire juga menganggap bahwa toleransi memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi komunitas. Ia menyatakan bahwa masyarakat yang menunjukkan toleransi biasanya lebih berkembang sebab mampu menjalin kerjasama yang luas antar kelompok

⁵⁸Saintio and D., "Mengkomunikasikan Keadilan Dan Kemanusiaan: Mengkritik Intoleransi Dan Mengupayakan Keadilan Ala Voltaire," 48–49.

⁵⁹Saintio and D., "Mengkomunikasikan Keadilan Dan Kemanusiaan: Mengkritik Intoleransi Dan Mengupayakan Keadilan Ala Voltaire," 48.

yang berbeda.⁶⁰ Dalam masyarakat yang memiliki beragam agama, perbedaan kepercayaan sering kali mempengaruhi interaksi sosial, termasuk dalam kegiatan ekonomi.⁶¹ Namun, jika masyarakat tersebut mempraktikkan toleransi yang tinggi, perbedaan itu tidak menjadi halangan, melainkan bisa menjadi kekuatan untuk membangun kolaborasi ekonomi.⁶²

Voltaire menyoroti bahwa sikap toleransi memungkinkan terjalinnya interaksi konstruktif antar individu dari berbagai latar belakang.⁶³ Hal ini mendorong pertukaran gagasan, peningkatan inovasi, serta kreativitas yang berdampak positif bagi kemajuan ekonomi.⁶⁴ Selain itu, hubungan ekonomi yang berlandaskan toleransi bisa membentuk jaringan sosial yang solid di antara berbagai kelompok masyarakat.⁶⁵ Jaringan ini menjadi aset sosial yang sangat penting untuk memperluas kesempatan usaha, memperkuat saling percaya antar individu, serta mendukung stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

⁶⁰Azmi Arifin, "Les Philosophés Kurun Ke-18 Di Perancis: Sifat-Sifat Reaksioner Di Sebalik Bayang Revolusioner," *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies* 37 (2010): 122–152.

⁶¹Sofiandi et al., "Antara Ekonomi Dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman," *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 14, no. 2 (2022): 71–83.

⁶²Sofiandi et al., "Antara Ekonomi Dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman," 74.

⁶³Sofiandi et al., "Antara Ekonomi Dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman," 75.

⁶⁴Sofiandi et al., "Antara Ekonomi Dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman," 75–76.

⁶⁵Sofiandi et al., "Antara Ekonomi Dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman," 76.

Di sisi lain, di masyarakat yang tidak toleran, diskriminasi terhadap kelompok tertentu menghalangi partisipasi mereka di bidang ekonomi.⁶⁶ Kelompok minoritas sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga potensi mereka tidak dapat tumbuh dengan baik.⁶⁷ Keadaan ini tidak hanya merugikan bagi kelompok yang terkena diskriminasi, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat keseluruhan, sebab dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan sosial.⁶⁸ Oleh karena itu, toleransi menjadi elemen krusial dalam menciptakan kesetaraan ekonomi.

Ketika orang-orang dari berbagai latar belakang berkolaborasi dalam kegiatan ekonomi, mereka lebih mudah menjalin hubungan yang saling menghargai dan memahami perbedaan.⁶⁹ Dalam praktiknya, hubungan ekonomi yang harmonis dapat mengurangi risiko konflik sosial, karena adanya kepentingan bersama yang perlu dijaga. Kerja sama di bidang ekonomi membuat masyarakat lebih terfokus pada tujuan kolektif dibandingkan pada perbedaan yang ada. Selain itu, toleransi dalam kegiatan

⁶⁶Dewi Masriah and Desi Aryani, "Faktor Sosial Budaya Terhadap Perkembangan Radikalisme Dan Intoleransi: Sebuah Kajian Literatur," *Diksi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial* 6, no. 4 (2025): 683–691.

⁶⁷Masriah and Aryani, "Faktor Sosial Budaya Terhadap Perkembangan Radikalisme Dan Intoleransi: Sebuah Kajian Literatur," 683.

⁶⁸Masriah and Aryani, "Faktor Sosial Budaya Terhadap Perkembangan Radikalisme Dan Intoleransi: Sebuah Kajian Literatur," 684.

⁶⁹Sofiandi et al., "Antara Ekonomi Dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman," 73.

ekonomi juga berkontribusi pada stabilitas sosial.⁷⁰ Stabilitas ini sangat penting untuk menarik investasi, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, toleransi tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷¹ Masyarakat yang terbuka dan inklusif cenderung lebih berkembang dibandingkan masyarakat yang tertutup dan diskriminatif. Dengan demikian, toleransi merupakan elemen penting dalam mendorong kerjasama, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa toleransi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etis dalam interaksi antar manusia, tetapi juga sebagai dasar penting dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat toleransi dalam suatu masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk mencapai kemajuan ekonomi yang inklusif dan merata.

E. Masyarakat Multireligius

Masyarakat yang terdiri dari berbagai agama adalah sebuah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya berbagai kelompok keagamaan dalam satu lingkungan hidup yang sama. Dalam pengertian

⁷⁰Sofiandi et al., "Antara Ekonomi Dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman," 74–75.

⁷¹Sofiandi et al., "Antara Ekonomi Dan Toleransi Membingkai Ekonomi Dalam Keragaman," 75.

yang lebih luas, masyarakat multireligius tidak sekadar dilihat sebagai kumpulan orang-orang dengan latar belakang agama yang beragam, melainkan sebagai suatu sistem sosial di mana terjadi interaksi, hubungan, dan dinamika kehidupan yang melibatkan berbagai kepercayaan, nilai-nilai, serta praktik-praktik keagamaan.⁷² Interaksi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Secara konseptual, masyarakat multireligius memiliki keberagaman agama dalam kehidupan sosial. Keberagaman ini menunjukkan adanya beragam keyakinan yang diakui keberadaannya dalam satu lingkungan. Dalam situasi ini, tidak ada agama yang sepenuhnya mendominasi semua sektor kehidupan sosial, melainkan terdapat beberapa kelompok agama yang hidup berdampingan dengan identitas dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat multireligius adalah manifestasi nyata dari pluralisme agama yang meminta pengakuan terhadap perbedaan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.⁷³

Setiap elemen sosial memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat multireligius. Individu sebagai bagian dari masyarakat menjadi pelaku utama dalam membangun hubungan sosial antaragama melalui aktivitas sehari-hari. Di samping itu, kelompok keagamaan sebagai komunitas juga berkontribusi dalam menjaga identitas dan ajaran masing-

⁷²Sri Astuti, "Interaksi Masyarakat Multireligius di Desa Tegalsari Belitang II Oku Timur Sumatera Selatan," *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 13, no. 2 (2017): 235–257.

⁷³H. Sirajuddin, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Bengkulu: Penerbit Cv. Zigie Utama, 2020), 157–160.

masing. Para pemuka agama berfungsi sebagai pemimpin spiritual yang dapat memengaruhi perspektif umat terhadap agama lain, sementara pemimpin masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan hubungan harmonis di tengah perbedaan. Di sisi lain, lembaga formal seperti pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh kelompok agama.⁷⁴ Dengan demikian, masyarakat multireligius merupakan hasil dari keterlibatan berbagai pihak yang saling berinteraksi dalam satu sistem sosial.

Komunitas multireligius dapat ditemukan dalam banyak aspek kehidupan, dari lingkungan kecil seperti desa dan komunitas lokal hingga skala yang lebih besar seperti kota dan negara. Keberagaman agama di setiap ruang tersebut menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah hal yang terpisah dari kehidupan sosial, tetapi merupakan bagian alami dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks desa, interaksi antarumat beragama biasanya lebih dekat dan bersifat personal, karena hubungan sosial yang terbentuk biasanya memiliki nuansa kekeluargaan. Sebaliknya, dalam lingkungan kota, interaksi menjadi lebih rumit akibat jumlah penduduk yang lebih banyak, latar belakang yang lebih beragam, serta

⁷⁴Ermelinda Rafu et al., "Strategi Komunikasi Dalam Membangun Keharmonisan Di Tengah Masyarakat Multireligius Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 1 (2025): 716–721.

dinamika sosial yang lebih dinamis.⁷⁵ Oleh karena itu, setiap ruang sosial memiliki ciri khas tersendiri dalam menangani dan merespons keberagaman agama, baik melalui interaksi sehari-hari maupun melalui sistem dan regulasi yang ada. Cara masyarakat menjalin hubungan antarumat beragama sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam suatu daerah, budaya setempat, tradisi, sejarah, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi memiliki dampak signifikan dalam membentuk cara interaksi sosial. Dalam beberapa kasus, budaya dan adat dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok agama melalui kegiatan sosial dan kultural bersama.

Namun, di konteks lain, perbedaan cara memahami nilai-nilai tersebut juga dapat memicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai masyarakat multireligius perlu mempertimbangkan konteks sosial di mana interaksi tersebut terjadi, karena setiap lingkungan memiliki dinamika berbeda dalam menciptakan, menjaga, dan menguji keharmonisan di tengah berbagai keyakinan agama.⁷⁶

Masyarakat beragam agama terbentuk dari sejarah yang panjang dan terus berubah. Mobilitas penduduk, penyebaran agama lewat misi

⁷⁵I Kadek Yudiana, Miskawi, dan I Wayan Pardi, "Analisis Kerukunan Antar Umat Beragama Pada Masyarakat Multikultur Di Ujung Timur Pulau Jawa (Studi Kasus Di Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur)," dalam *Seri Studi Kebudayaan I: Pluralisme, Multikulturalisme, Dan Batas-Batas Toleransi* (Malang: Prodi Antropologi, FIB Universitas Brawijaya, 2017), 250–256.

⁷⁶Akhsin Ridho, "Toleransi Keagamaan Masyarakat Di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon," *Harmoni* 19, no. 2 (2020): 368–390.

keagamaan, perdagangan, dan perkembangan peradaban manusia merupakan faktor penting yang membentuk masyarakat yang religius beragam. Selain itu, perubahan dalam aspek sosial dan politik juga berperan dalam terbentuknya masyarakat multireligius, seperti kebijakan pemerintah mengenai kebebasan beragama dan pengakuan hak-hak kelompok minoritas.⁷⁷ Dengan demikian, masyarakat multireligius bukanlah kondisi yang tetap, tetapi selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan dinamika kehidupan manusia.

Pemahaman masyarakat yang memiliki berbagai agama menjadi sangat krusial dalam interaksi sosial. Keberagaman agama memunculkan dua kemungkinan yang berbeda. Di satu sisi, perbedaan keyakinan bisa menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sikap eksklusif, fanatisme, dan anggapan tentang kebenaran yang mutlak sering kali mengarah pada ketegangan dan bahkan tindakan kekerasan di antara umat beragama.⁷⁸ Namun, di sisi lain, keragaman dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial yang memperkaya kehidupan kolektif jika disertai dengan sikap saling menghargai, keterbukaan, dan kesediaan untuk hidup berdampingan dengan damai. Oleh sebab itu, masyarakat yang multireligius memerlukan suatu prinsip yang dapat menjembatani perbedaan tersebut,

⁷⁷A. Bakir Ihsan and Cucu Nurhayati, *Agama, Negara, Dan Masyarakat: Tokoh Agama Di Tengah Politik Identitas Warga Kota* (Jakarta: Penerbit Haja Mandiri, 2020), 142.

⁷⁸Husna Hanifah, Fadhilah Ikhwan, and Sahdin Hsb, "Konflik Antar Agama, Resolusi Dan Rekonsiliasi," *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)* 3, no. 1 (2026): 248–258.

yaitu toleransi sebagai dasar dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.⁷⁹

Masyarakat multireligius berinteraksi, hubungan antara umat beragama menjadi sangat penting karena ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari hubungan sosial sehari-hari, kolaborasi dalam kegiatan masyarakat, hingga dialog antaragama yang bertujuan untuk membangun pemahaman. Dalam pelaksanaannya, interaksi ini tidak selalu berlangsung tanpa rintangan, sebab perbedaan keyakinan tetap berpotensi menimbulkan ancaman konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme sosial yang mengatur hubungan tersebut, seperti norma sosial, nilai-nilai budaya, dan peran institusi dalam menjaga keseimbangan dan keadilan.⁸⁰ Dalam konteks ini, toleransi tidak hanya dilihat sebagai sikap pasif yang berarti tidak mengganggu orang lain, tetapi juga sebagai sikap aktif untuk menghargai, menerima, dan bekerja sama dengan mereka yang berbeda.

Agama bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memengaruhi cara individu berinteraksi dengan satu sama lain. Sebab itu, dalam masyarakat yang multireligius, perlu adanya kesadaran bahwa perbedaan agama merupakan bagian dari kenyataan sosial yang tak terhindarkan. Kesadaran ini mendorong timbulnya sikap saling

⁷⁹Bayu Aji Nugroho, "Representasi Multikulturalisme Antar Etnis Di Kota Samarinda Mewujudkan Harmonisasi Sosial Ibu Kota Negara Nusantara," *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)* 11, no. 2 (2025): 181.

⁸⁰Marpuah, "Toleransi Dan Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama Di Cigugur, Kuningan," *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 51–72.

menghormati dan pengakuan terhadap hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan mereka.

Dengan begitu, masyarakat multireligius dapat dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang kompleks, dinamis, dan penuh tantangan serta peluang. Keragaman agama dalam masyarakat bukan hanya merupakan perbedaan belaka, tetapi juga kenyataan yang memerlukan pengelolaan yang bijak melalui nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia.⁸¹ Dalam hal ini, masyarakat yang multireligius menjadi ruang di mana perbedaan tidak hanya diterima, namun juga dikelola secara konstruktif demi menciptakan kehidupan bersama yang damai dan harmonis.

⁸¹Ari Asisaka Chaliq Putra, Siti Raudhatul Jannah, dan Win Usuluddin, "Komunikasi Interpersonal Keluarga Beda Agama Dalam Penanaman Nilai Toleransi Di Desa Sukoreno," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 25, no. 2 (2025): 231–252.